

STRATEGI KERJASAMA SATUAN TUGAS MARINIR PASMAR 1 DAN KODIM 0601/PANDEGLANG DALAM PENGAMANAN PULAU DELI DI BANTEN

Budi Darmawan

Universitas Pertahanan RI

e-mail: erbud1704@gmail.com

ABSTRAK

Pulau terluar memiliki fungsi strategis sebagai batas kedaulatan negara sehingga pengamanannya menjadi tanggung jawab penting bagi aparat keamanan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pulau Deli di Provinsi Banten merupakan salah satu pulau terluar yang memiliki posisi strategis sekaligus rawan terhadap ancaman keamanan, baik berupa penyelundupan, aktivitas ilegal, hingga potensi pergerakan kelompok radikal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang sinergis antara TNI AL dan TNI AD untuk memastikan stabilitas dan keamanan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kerjasama yang dijalankan oleh Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) Pasmar 1 TNI AL dan Kodim 0601/Pandeglang TNI AD dalam pengamanan Pulau Deli, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar kerjasama dapat berjalan lebih optimal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi operasional antar satuan masih belum berjalan optimal, sementara perbedaan persepsi mengenai pembagian peran menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas komunikasi, perbaikan mekanisme koordinasi, serta pelaksanaan latihan bersama guna membangun pemahaman dan sinergi antar satuan. Temuan utama penelitian ini adalah kebutuhan model strategi kerjasama terpadu yang tidak hanya memperkuat pengamanan Pulau Deli, tetapi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan stabilitas keamanan nasional di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: *Pulau Deli, strategi kerjasama, Satgasmar, Kodim, keamanan nasional.*

ABSTRACT

Outermost islands play a strategic role as the frontiers of national sovereignty, making their security a crucial responsibility of state security apparatus. Although the government has established policies for managing and safeguarding these islands, implementation in the field still faces various challenges. Deli Island, located in Banten Province, is one of the outermost islands with both strategic value and vulnerability to security threats, including smuggling, illegal activities, and the potential movement of radical groups. Therefore, effective cooperation between the Indonesian Navy (TNI AL) and the Indonesian Army (TNI AD) is essential to ensure stability and territorial security. This study aims to analyze the cooperation strategies undertaken by the Marine Task Force (Satgasmar) Pasmar 1 of the Navy and Kodim 0601/Pandeglang of the Army in securing Deli Island, as well as to provide recommendations for improving the effectiveness of this collaboration. The research applied a qualitative descriptive approach through in-depth interviews and field observations. The findings reveal that operational coordination and communication between the two units remain suboptimal, while differences in role perception hinder the effectiveness of joint tasks. This study recommends strengthening communication, refining coordination mechanisms, and conducting joint training to build mutual understanding and synergy. The novelty of this research lies in the

proposed integrated cooperation strategy model that not only enhances the security of Deli Island but also contributes to the broader goal of national security and sovereignty in border regions.

Keywords: *Deli Island, cooperation strategy, Marine Task Force, Kodim, national security.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dengan garis pantai yang sangat panjang dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keberadaan pulau-pulau ini tidak hanya menjadi identitas geografis, tetapi juga merupakan aset strategis yang menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global. Di antara ribuan pulau tersebut, terdapat pulau-pulau terluar yang memiliki arti penting karena langsung berbatasan dengan negara lain. Pulau-pulau terluar bukan hanya titik koordinat geografis, melainkan juga penanda kedaulatan negara yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, pengamanan wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau terluar, menjadi aspek vital dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat ekonomi maritim, serta mendukung keamanan dan pertahanan negara. Hal ini menegaskan bahwa persoalan pengelolaan wilayah perbatasan tidak bisa hanya dipandang dari sudut pandang militer semata, melainkan juga harus mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan diplomasi internasional (Modeong, Kalalo, & Karisoh, 2020; Yovinus, 2018).

Meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan besar. Luasnya wilayah laut Indonesia membuat proses pengawasan menjadi sangat kompleks dan memerlukan sumber daya yang besar, baik dalam hal personel, peralatan, maupun teknologi. Keterbatasan infrastruktur pengawasan di sejumlah pulau terluar menyebabkan aktivitas ilegal, seperti pencurian ikan, penyelundupan narkoba, pelanggaran batas wilayah laut, hingga praktik merusak lingkungan seperti pengeboman ikan, masih sering terjadi. Situasi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan laut dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir. Lemahnya pengawasan di wilayah terluar memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara normatif dengan implementasi yang terjadi secara faktual (Fernando, 2024; Varikta, 2020).

Pulau Deli yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, merupakan contohnya dari kompleksitas permasalahan tersebut. Sebagai salah satu pulau terluar yang berhadapan langsung dengan perairan internasional, Pulau Deli memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman lintas batas. Letak geografis yang terbuka membuat pulau ini rawan menjadi pintu masuk aktivitas ilegal baik oleh pihak asing maupun domestik. Beberapa ancaman yang kerap terjadi di Pulau Deli antara lain praktik illegal fishing yang menguras sumber daya laut, penyelundupan narkoba yang membahayakan generasi muda, hingga pengeboman ikan yang merusak ekosistem terumbu karang. Ancaman-ancaman tersebut mencerminkan bahwa Pulau Deli tidak hanya menghadapi ancaman tradisional yang bersifat militer, tetapi juga ancaman non-tradisional yang lebih kompleks dan multidimensional. Konteks ini menuntut strategi pengamanan yang lebih holistik dan terintegrasi agar wilayah tersebut tidak menjadi titik lemah dalam pertahanan negara (Susanto, Affriani, & Ramadhani, 2025).

Upaya pengamanan Pulau Deli selama ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Marinir (Pasmar) I yang bertanggung jawab menjaga keamanan laut di sekitar pulau, sedangkan pengamanan darat berada di bawah kewenangan Kodim 0601/Pandeglang yang merupakan

bagian dari Korem 064/Maulana Yusuf di bawah Kodam III/Siliwangi. Secara konseptual, kedua institusi ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Satgasmar berfokus pada aspek pertahanan maritim, termasuk pencegahan pelanggaran wilayah laut, sementara Kodim menitikberatkan pada pembinaan teritorial, kesiapan operasi militer, serta penguatan hubungan dengan masyarakat lokal. Kolaborasi keduanya menjadi sangat penting dalam membangun sistem pertahanan yang terpadu di wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menekankan pentingnya sinergi TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI (Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004; Safi'i & Permana, 2021; Herdian & Hermawan, 2024).

Namun demikian, implementasi kerjasama antara Pasmar I dan Kodim 0601/Pandeglang masih menemui berbagai kendala. Beberapa hambatan yang ditemukan di lapangan adalah terbatasnya komunikasi simultan dalam merespons situasi darurat, minimnya koordinasi dalam penanganan tindak pidana di laut, serta kurang optimalnya integrasi dalam upaya pencegahan ancaman. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ideal akan pengamanan yang terintegrasi dengan realitas koordinasi yang masih sektoral. Padahal, dalam konteks pertahanan negara kepulauan, kerjasama lintas instansi merupakan syarat mutlak agar potensi kerawanan di wilayah perbatasan dapat diminimalkan. Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa bentuk kerjasama yang efektif akan meningkatkan daya tangkal pertahanan, memperkuat diplomasi pertahanan, serta menumbuhkan rasa aman di kalangan masyarakat (Pamungkas, Subagyo, & Ginanjar, 2024; Uksan & Siahaan, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis strategi kerjasama yang dibangun oleh Satgas Marinir Pasmar I dengan Kodim 0601/Pandeglang dalam pengamanan Pulau Deli. Fokus penelitian tidak hanya terbatas pada bentuk kerjasama yang sudah berjalan, tetapi juga mencakup faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem pengamanan di pulau-pulau kecil wilayah perbatasan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual dalam pengembangan teori kerjasama lintas instansi, maupun secara praktis sebagai referensi bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam merumuskan kebijakan pertahanan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pengamanan pulau terluar serta mendorong terbentuknya model sinergi yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman keamanan di masa depan (Yusnadi, Sumarno, & Apandi, 2025; Sutanto, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai bentuk kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 dengan Kodim 0601/Pandeglang dalam menjaga keamanan di Pulau Deli. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dari perspektif para pelaku di lapangan, sementara desain deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta sebagaimana adanya tanpa manipulasi variabel. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumen internal, dan data sekunder berupa laporan resmi, arsip institusi, maupun literatur yang relevan sebagai pendukung analisis. Informan penelitian ditentukan secara purposif dan terdiri dari berbagai pihak yang berperan langsung dalam pengamanan, meliputi Komandan

Lanal Banten, Dandim Pandeglang, Komandan Satgas Pasmar 1 Pulau Deli, Paban Sops Pasmar 1, Danramil Malingping, tokoh masyarakat setempat, serta anggota Marinir yang bertugas di Pulau Deli, dengan jumlah keseluruhan tujuh orang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang berfokus pada pola kerjasama, hambatan, dan strategi yang diterapkan. Seluruh proses penelitian dilaksanakan di Pulau Deli, Provinsi Banten, yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dengan posisi strategis dalam konteks pertahanan dan kedaulatan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Gambar 1. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 menampilkan dokumentasi penelitian yang merekam keterlibatan langsung personel Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang dalam aktivitas pengamanan Pulau Deli. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti visual atas keterlibatan kedua institusi di lapangan, sekaligus memperlihatkan situasi nyata yang menjadi objek penelitian. Kehadiran foto tersebut mendukung validitas data dengan menggambarkan pola koordinasi, penggunaan sarana operasional, serta interaksi personel dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. Dengan demikian, Gambar 1 bukan hanya berperan sebagai pelengkap narasi penelitian, tetapi juga menjadi representasi konkret dari dinamika kerjasama antar satuan militer dalam menjaga keamanan pulau terluar yang strategis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 TNI AL dan Kodim 0601/Pandeglang TNI AD dalam pengamanan Pulau Deli memiliki kerangka kerja yang cukup jelas namun belum optimal. Sinergi yang diharapkan dalam mengamankan kawasan strategis tersebut masih terkendala pada aspek komunikasi, struktur komando, dan koordinasi lintas matra. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga hambatan utama dalam pelaksanaan kerjasama yakni: pertama, perbedaan Pangkat dan Hirarki antara Komandan Satgasmar (Letnan Satu) dan Komandan Kodim (Letnan Kolonel), yang menimbulkan ketimpangan komunikasi dan hambatan psikologis dalam pengambilan keputusan. Kedua, luasnya Wilayah Tanggung Jawab Kodim, yang meliputi lebih dari 30 kecamatan, menyebabkan perhatian terhadap Pulau Deli menjadi terbatas. Ketiga, jarak geografis antara markas Kodim dan Pulau Deli menyebabkan interaksi langsung minim, sehingga koordinasi hanya mengandalkan media komunikasi digital seperti WhatsApp. Guna mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini mencatat beberapa langkah adaptif yang telah diimplementasikan, yaitu: 1) Mediasi oleh Komandan Lanal Banten, yang berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani kesenjangan struktural antar institusi. 2) Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis digital, khususnya WhatsApp, untuk mendukung komunikasi real-time dan

mempercepat pengambilan keputusan. 3) Peningkatan interaksi di tingkat operasional, melalui peran aktif Koramil Malimping dalam menjalin koordinasi langsung dengan Satgasmar di Pulau Deli.

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi efektivitas kerjasama. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Kekuatan internal (profesionalisme marinir, dedikasi personel, dan kedekatan geografis dengan Jakarta) mendominasi. 2) Peluang eksternal (dukungan pemerintah pusat dan kesempatan latihan bersama) cukup besar untuk dimanfaatkan. 3) Berdasarkan hasil IFAS dan EFAS, kerjasama berada dalam kuadran I (Strength–Opportunity) yang menuntut strategi agresif dengan mengoptimalkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal.

Dua strategi utama yang diprioritaskan dalam hasil penelitian ini adalah : 1) Pengembangan Latihan Gabungan. Latihan bersama secara terstruktur antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang diusulkan untuk meningkatkan kemampuan operasional, koordinasi taktis, serta kesadaran situasional di lapangan. Latihan ini melibatkan simulasi nyata, manuver gabungan, dan sinergi antarmatrawilayah. 2) Pembentukan Sistem Komunikasi Digital Terintegrasi. Strategi ini bertujuan membangun sistem komunikasi berbasis digital yang mendukung pertukaran informasi secara real-time. Implementasi mencakup pengadaan perangkat, pelatihan penggunaan, dan penerapan protokol koordinasi operasional antar satuan.

Pembahasan

Batas Wilayah Pandeglang

Kabupaten Pandeglang adalah daerah strategis di Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, dengan luas 2.746,81 km². Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Samudra Hindia di selatan, Selat Sunda di barat, dan Kabupaten Lebak di timur. Panjang garis pantai mencapai 230 km, diperkuat oleh bentang alam pegunungan seperti Gunung Karang dan Gunung Pulosari, serta keberadaan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi internasional. Secara historis, Pandeglang ditetapkan sebagai kabupaten mandiri melalui Staatsblad Nomor 73 Tahun 1874, setelah sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Serang. Penetapan ini menjadi tonggak identitas wilayah yang kaya nilai kultural, dengan berbagai versi asal-usul nama Pandeglang, baik dari istilah *Pandai Gelang* maupun *Paneglaan* (Susanto, Affriani, & Ramadhani, 2025). Secara administratif, Pandeglang memiliki 35 kecamatan dan 339 desa/kelurahan, dengan Cikeusik sebagai kecamatan terbesar dan Labuan yang terkecil. Sebagian besar wilayah berupa dataran rendah, namun banyak desa berada di lereng pegunungan dan sebagian lainnya di wilayah pesisir yang rawan bencana. Kondisi ini berimplikasi pada kebijakan pembangunan serta pengelolaan sumber daya lokal.

Jumlah penduduk pada 2023 tercatat 1.312.766 jiwa dengan mayoritas berada pada usia produktif. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Labuan karena posisinya di jalur ekonomi pesisir, sementara wilayah selatan cenderung berpenduduk jarang. Pandeglang juga memiliki Pulau Deli, salah satu pulau terluar Indonesia yang luasnya sekitar 9–11 km² dengan topografi datar. Pulau ini beriklim basah, terpencil, dan sulit dijangkau sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek keamanan dan pengelolaan wilayah. Dalam bidang pertahanan, Kodim 0601/Pandeglang di bawah Korem 064/Maulana Yusuf bertanggung jawab pada pembinaan teritorial dan keamanan daerah. Selain itu, Pasmar 1 TNI AL bertugas menjaga Pulau Deli sebagai bagian dari pengamanan perbatasan maritim. Pada Juni 2024, pergantian komando Satgas Pasmar 1 dilakukan di Pantai Karang Malang sebagai upaya kesinambungan operasi, yang menegaskan pentingnya sinergi TNI AD dan TNI AL dalam menjaga stabilitas perbatasan

laut Pandeglang.

Implementasi Pelaksanaan Kerjasama

Kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang dalam pengamanan Pulau Deli mencerminkan pentingnya sinergi antar-matra TNI dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah terluar. Pulau Deli, yang memiliki posisi strategis di perairan Samudra Hindia, menjadi kawasan rawan terhadap ancaman eksternal, baik berupa aktivitas ilegal maupun potensi intervensi asing. Sejak penugasan Satgasmar pada tahun 2022, pola kerjasama ini diarahkan untuk mengintegrasikan pertahanan laut dan darat. Pasukan Marinir berperan menjaga keamanan maritim melalui patroli perairan dan pengawasan aktivitas kapal, sedangkan Kodim 0601/Pandeglang bertanggung jawab pada aspek teritorial darat, termasuk pengawasan penduduk lokal dan koordinasi dengan aparat sipil. Strategi pengamanan dilakukan melalui pertukaran data intelijen, operasi lapangan terkoordinasi, serta penggunaan teknologi komunikasi digital untuk mempercepat alur informasi. Pola ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kerjasama militer bergantung pada efektivitas koordinasi serta kejelasan pembagian peran, sejalan dengan praktik kerjasama pertahanan di berbagai studi sebelumnya (Pamungkas, Subagyo, & Ginanjar, 2024).

Namun demikian, implementasi kerjasama menghadapi sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Perbedaan pangkat antara komandan Satgasmar dan Kodim 0601 kerap menimbulkan hambatan psikologis dalam komunikasi, sementara cakupan tanggung jawab Kodim yang meliputi lebih dari 30 kecamatan membuat pengawasan khusus terhadap Pulau Deli tidak selalu optimal. Di sisi lain, jarak geografis yang cukup jauh antara markas Kodim dengan Pulau Deli turut membatasi interaksi langsung antar-personel, sehingga komunikasi lebih sering bergantung pada media digital yang belum sepenuhnya menggantikan koordinasi tatap muka. Untuk mengatasi hal ini, dilaksanakan operasi gabungan yang melibatkan Koramil Malimping di bawah Kodim 0603/Lebak, serta mediasi oleh Danlanal Banten guna memperkuat integrasi antar-matra. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi militer di daerah strategis tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga memerlukan adaptasi sosial dan kelembagaan, sebagaimana juga terjadi dalam praktik kerjasama militer di bidang lain seperti penanganan bencana dan operasi non-perang (Yusnadi, Sumarno, & Apandi, 2025).

Hambatan Pelaksanaan Kerjasama

Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut mencakup aspek administratif, teknis, hingga sosial yang berpengaruh terhadap efektivitas strategi pengamanan Pulau Deli. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan pangkat antara komandan Satgasmar yang berpangkat Letnan Satu dan komandan Kodim yang berpangkat Letnan Kolonel. Perbedaan jenjang kepangkatan ini menciptakan jarak psikologis yang membuat komunikasi tidak berjalan setara, sehingga inisiatif atau masukan dari pihak Satgasmar seringkali kurang optimal tersampaikan. Selain itu, lingkup tanggung jawab Dandim yang sangat luas, mencakup lebih dari 30 kecamatan, mengakibatkan perhatian terhadap Pulau Deli tidak bisa maksimal. Koordinasi pun seringkali disalurkan melalui staf teritorial atau Danramil Malimping, yang meskipun menjaga arus komunikasi, tetap membatasi efektivitas pengambilan keputusan strategis secara langsung.

Di sisi lain, faktor geografis juga menjadi kendala signifikan. Jarak yang jauh antara markas Kodim dan Pulau Deli menyebabkan interaksi tatap muka jarang dilakukan, sehingga

komunikasi lebih banyak bersifat formal dan administratif. Kondisi ini membuat pemahaman mendalam mengenai situasi lapangan serta kebutuhan masing-masing satuan menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada sulitnya membangun sinergi yang solid, karena koordinasi lebih banyak dilakukan secara jarak jauh dengan ketergantungan pada teknologi komunikasi. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama militer di wilayah strategis seperti Pulau Deli tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, keterlibatan langsung, serta efektivitas koordinasi antar-komandan (Suharto & Supadno, 2023).

Strategi mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kerjasama

Dalam menghadapi hambatan kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat adaptif. Salah satu kendala utama adalah perbedaan pangkat antara komandan kedua satuan, yang menimbulkan jarak psikologis dalam komunikasi. Untuk mengatasi hal ini, Komandan Lanal (Danlanal) Banten berperan sebagai mediator sekaligus fasilitator agar hubungan kerja sama dapat berjalan lebih seimbang. Kehadiran Danlanal, yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam struktur TNI AL, mampu mereduksi hambatan psikologis dan memastikan proses komunikasi berlangsung secara lebih terbuka. Selain itu, beban tanggung jawab Kodim 0601/Pandeglang yang luas, mencakup lebih dari 30 kecamatan, juga menuntut adanya solusi praktis. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi komunikasi modern seperti WhatsApp menjadi instrumen penting karena memungkinkan komunikasi real-time, efisien, serta terdokumentasi dengan baik. Melalui aplikasi ini, komandan Satgasmar dapat berhubungan langsung dengan Dandim tanpa terkendala jarak atau kesibukan, sekaligus menjaga kesinambungan koordinasi meskipun tidak selalu ada interaksi tatap muka.

Selain perbedaan pangkat dan luasnya cakupan wilayah, tantangan lain yang dihadapi adalah jarak geografis antara markas Kodim dan Pulau Deli. Untuk meminimalkan hambatan tersebut, kerjasama diperkuat di tingkat operasional, terutama melalui Koramil Malimping yang secara geografis lebih dekat dengan wilayah pengamanan. Keberadaan Koramil Malimping memungkinkan Satgasmar Pasmar 1 memperoleh akses informasi lapangan dengan cepat, khususnya terkait aktivitas masyarakat pesisir dan dinamika keamanan lokal. Dengan memperbanyak interaksi langsung di tingkat lapangan, keputusan dapat diambil secara lebih responsif tanpa harus menunggu instruksi dari komando yang lebih tinggi. Strategi ini tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga membangun fleksibilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Secara keseluruhan, penguatan peran Danlanal sebagai mediator, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta kolaborasi operasional dengan Koramil Malimping menunjukkan bahwa hambatan kerjasama dapat diatasi melalui pendekatan pragmatis yang menggabungkan solusi struktural, teknologis, dan lapangan (Sutanto, 2025; Herdian & Hermawan, 2024).

Konsep Strategi Kerjasama yang Efektif

Guna memastikan pengamanan Pulau Deli berjalan lebih efektif dan efisien, maka saat ini, solusi yang diterapkan mencakup peningkatan komunikasi, fasilitasi oleh Komandan Lanal Banten, serta penguatan kerjasama operasional di lapangan. Sasaran dari pemecahan masalah ini mencakup peningkatan intensitas komunikasi, pengurangan hambatan psikologis terkait perbedaan pangkat, dan penguatan koordinasi antara Koramil Malimping dan Satgasmar Pasmar 1. Sedangkan Objek dari pemecahan masalah ini adalah seluruh personel kedua satuan, dengan fokus pada peningkatan efektivitas komunikasi, pemanfaatan sumber daya maupun

dukungan operasional. Sementara itu, subjek pemecahan masalah melibatkan komandan dan personel dari kedua institusi, termasuk Danramil Malimping, dan Komandan Lanal Banten yang berperan sebagai fasilitator. Selain itu, peran staf logistik dan komunikasi juga sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional. Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi pos pengawasan, alat komunikasi, transportasi laut, dan teknologi komunikasi digital untuk memastikan koordinasi cepat dan efisien antara kedua pihak, meskipun ada keterbatasan geografis.

Selain itu, untuk meningkatkan kerjasama antara kedua satuan dalam pengamanan Pulau Deli, dilakukan analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kerjasama, sehingga dapat merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang dalam pengamanan Pulau Deli dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT

IFAS	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
EFAS	<p>Peluang (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peluang penguatan kerjasama dengan Kodim 0601/Pandeglang 2. Dukungan dari pusat pemerintahan di Jakarta 3. Kesempatan untuk melakukan latihan bersama di wilayah perbatasan <p>Kendala (Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ancaman dari pihak eksternal 2. Perkembangan teknologi militer global 3. Kehadiran kekuatan asing di jalur pelayaran internasional 	<p>STRATEGI S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> S1 - O1 S1 - O2 S1 - O3 S2 - O1 S2 - O2 S2 - O3 S3 - O1 S3 - O2 S3 - O3 <p>STRATEGI S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> S1 - T1 S1 - T2 S1 - T3 S2 - T1 S2 - T2 S2 - T3 S3 - T1 S3 - T2 S3 - T3 <p>STRATEGI W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> W1 - O1 W1 - O2 W1 - O3 W2 - O1 W2 - O2 W2 - O3 W3 - O1 W3 - O2 W3 - O3 <p>STRATEGI W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> W1 - T1 W1 - T2 W1 - T3 W2 - T1 W2 - T2 W2 - T3 W3 - T1 W3 - T2 W3 - T3

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1, Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) yang memanfaatkan kekuatan internal, Satgasmar Pasmar 1 dapat meraih peluang di lingkungan eksternal dengan mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki guna memanfaatkan berbagai peluang, sehingga mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara dalam Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) berfokus pada memanfaatkan peluang eksternal yang ada untuk mengatasi kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki oleh Satgasmar Pasmar 1. Strategi ini penting karena memungkinkan untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia guna memperbaiki kekurangannya, sehingga dapat memperkuat kemampuan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dalam konteks ini, strategi WO mendorong Satgasmar Pasmar 1 untuk lebih responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal sambil melakukan perbaikan internal yang diperlukan.

Sedangkan dalam Strategi ST (*Strength-Threats*) berfokus pada bagaimana memanfaatkan kekuatan internal secara efektif untuk mengatasi atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi ini sangat penting ketika Satgasmar Pasmar 1 dihadapkan pada tantangan besar yang dapat menghambat pencapaian tujuannya, seperti persaingan yang ketat, perkembangan teknologi yang cepat, atau perubahan geopolitik. Dengan demikian, pemahaman dan optimalisasi kekuatan internal menjadi kunci agar Satgasmar Pasmar 1 dapat bertahan dan bahkan berkembang di tengah situasi yang penuh ancaman.

Terakhir, melalui Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) berfokus pada bagaimana Satgasmar Pasmar 1 dapat mengurangi kelemahan internal sambil menghadapi ancaman eksternal. Strategi ini biasanya diterapkan ketika dalam situasi di mana tantangan eksternal sangat besar, sementara kelemahan internal juga signifikan karena Strategi ini cenderung defensif dan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Contoh penerapannya meliputi langkah-langkah seperti konsolidasi, restrukturisasi, atau pembentukan kemitraan strategis untuk mengurangi dampak negatif ancaman sekaligus memperbaiki kelemahan internal yang ada.

Lebih lanjut, peneliti melakukan input data kedalam matriks IFAS dan EFAS dengan Bobot, Rating dan Skor sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks IFAS dan EFAS

NO	VARIABEL	BO BOT	RATING	SKOR
ANALISIS FAKTOR INTERNAL				
Kekuatan				
1	Kemampuan marinir yang profesional	0,35	4,00	1,40
2	Kedekatan geografis Pulau Deli dengan Jakarta	0,30	3,00	0,90
3	Loyalitas dan dedikasi marinir	0,35	4,00	1,40
Total		1,00		3,70
Kelemahan				
1	Kurangnya kerjasama formal dengan Kodim terdekat	0,30	2,00	0,60
2	Keterbatasan sarana dan prasarana di Pulau Deli	0,35	2,00	0,70
3	Teknologi pengawasan yang sederhana	0,35	1,00	0,35
Total		1,00		1,65
ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL				

NO	VARIABEL	BO BOT	RATING	SKOR
Peluang				
1	Peluang penguatan kerjasama dengan Kodim 0601 Pandeglang	0,40	2,00	0,80
2	Dukungan dari pusat pemerintahan di Jakarta	0,35	4,00	1,40
3	Kesempatan untuk melakukan latihan bersama di wilayah perbatasan	0,25	4,00	1,00
	Total	1,00		3,20
Kendala				
1	Ancaman dari pihak eksternal	0,40	2,00	0,80
2	Perkembangan teknologi militer global	0,35	3,00	1,05
3	Kehadiran kekuatan asing di jalur pelayaran internasional	0,25	2,00	0,50
	Total	1,00		2,35

Berdasarkan Tabel 2, hasil perhitungan IFAS dan EFAS untuk kerjasama antara Satgasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang dalam pengamanan Pulau Deli, nilai total yang didapatkan adalah sebagai berikut: 1) IFAS (faktor internal) menunjukkan skor total 3,70 untuk kekuatan dan 1,65 untuk kelemahan, sehingga didapatkan selisih positif sebesar +2,05. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih dominan dibandingkan kelemahan. 2) EFAS (faktor eksternal) menunjukkan skor total 3,20 untuk peluang dan 2,35 untuk kendala, sehingga didapatkan selisih positif sebesar +0,85. Ini menunjukkan bahwa peluang yang tersedia lebih besar dibandingkan ancaman atau kendala yang dihadapi.

Melihat dari selisih positif pada faktor internal dan eksternal, maka kerjasama ini berada pada Kuadran I (*Strength-Opportunity*), yang berarti strategi harus diterapkan dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk mengoptimalkan peluang eksternal sehingga fokus dalam perumusan langkah-langkah strategis. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan keunggulan internal sekaligus memanfaatkan berbagai peluang eksternal yang mendukung pencapaian tujuan operasional dan pertahanan di wilayah perbatasan.

Tabel 3. Strategi Terpilih

NO	RUMUSAN STRATEGI	HASIL PERKALIAN NILAI BOBOT X SKOR	JUMLAH	URUTAN
1	S1 - O1	1,40	0,80	2,20
2	S1 - O2	1,40	1,40	2,80
3	S1 - O3	1,40	1,00	2,40
4	S2 - O1	0,90	0,80	1,70
5	S2 - O2	0,90	1,40	2,30
6	S2 - O3	0,90	1,00	1,90
7	S3 - O1	1,40	0,80	2,20
8	S3 - O2	1,40	1,40	2,80

NO	RUMUSAN STRATEGI	HASIL PERKALIAN NILAI BOBOT X SKOR	JUMLAH	URUTAN
9	S3 - O3	1,40	1,00	2,40

Dari hasil analisis Tabel 3, peneliti menetapkan dua Strategi Prioritas terpilih untuk meningkatkan efektivitas kerjasama yang bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang eksternal secara maksimal. Dua kombinasi strategi prioritas tersebut adalah: 1) Kombinasi S1 - O2. Memanfaatkan kemampuan marinir yang profesional didukung oleh dukungan dari pusat pemerintahan di Jakarta. Profesionalisme marinir akan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan operasi, sementara dukungan dari pemerintah pusat, baik logistik maupun kebijakan, akan memperkuat kapabilitas dalam pengamanan wilayah strategis seperti Pulau Deli. 2) Kombinasi S2 - O3. Memanfaatkan kedekatan geografis Pulau Deli dengan Jakarta yang didukung oleh kesempatan untuk melakukan latihan bersama di wilayah perbatasan. Kedekatan ini memberikan akses cepat terhadap dukungan logistik dan operasional, sementara latihan bersama di wilayah perbatasan akan meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi ancaman potensial.

Strategi Terpilih

Strategi terpilih dalam memperkuat kerja sama antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang dalam pengamanan Pulau Deli difokuskan pada dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama adalah pengembangan sistem latihan gabungan yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui latihan bersama, kedua institusi dapat meningkatkan koordinasi lapangan, menyamakan prosedur operasional standar, serta mengidentifikasi potensi kelemahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Latihan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kedisiplinan, membangun kepercayaan tim, serta memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Dengan adanya kegiatan latihan yang terjadwal secara rutin, sinergi operasional dapat terus ditingkatkan sehingga efektivitas dalam menjaga wilayah perbatasan dan kawasan strategis tetap terjamin.

Pendekatan kedua adalah pembentukan sistem komunikasi berbasis digital yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mempercepat aliran informasi, meminimalisasi miskomunikasi, serta memastikan bahwa setiap perintah dan laporan dapat diterima secara real-time oleh seluruh personel yang terlibat dalam operasi. Komunikasi digital juga memungkinkan adanya sistem pemantauan terpadu yang dapat mendukung pengawasan wilayah Pulau Deli secara lebih efektif. Dengan demikian, strategi ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat koordinasi strategis dalam rangka menjaga keamanan Pulau Deli sebagai aset bernilai tinggi bagi pertahanan nasional. Kedua strategi ini, jika dijalankan secara konsisten, akan memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan ketahanan institusi pertahanan dalam mengamankan kawasan strategis Indonesia.

Pengembangan Sistem Latihan Gabungan Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang

Pengembangan sistem latihan gabungan menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang. Latihan bersama ini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan operasional, memperkuat koordinasi

lintas matra, serta menguji kesiapan personel dalam menghadapi berbagai ancaman. Materi latihan meliputi simulasi ancaman nyata baik di laut maupun di darat, manuver gabungan, hingga penerapan taktik terpadu dalam merespons potensi gangguan eksternal. Tujuan utama dari penyelenggaraan latihan ini adalah terciptanya sinergi yang lebih erat antara kedua institusi militer dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, khususnya Pulau Deli yang memiliki posisi strategis. Selain itu, latihan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis personel, memperkuat respons cepat terhadap ancaman, serta menumbuhkan kepercayaan antar satuan dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Dengan demikian, program latihan gabungan tidak hanya melatih kemampuan fisik dan taktis, tetapi juga membangun keselarasan dalam pola pikir dan pola tindak personel yang terlibat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, beberapa langkah perlu dilaksanakan secara konsisten. Pertama, penyusunan modul latihan gabungan yang terstruktur dan sesuai dengan konteks geografis serta potensi ancaman di Pulau Deli. Kedua, penyelenggaraan latihan secara berkala di medan nyata agar personel terbiasa menghadapi kondisi operasional sesungguhnya. Ketiga, mendorong keterlibatan pihak ketiga seperti Bakamla dan pemerintah daerah, yang dapat memberikan dukungan baik dalam aspek teknis maupun administratif. Evaluasi serta pembaruan materi latihan juga menjadi faktor penting untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi militer dan dinamika ancaman yang terus berubah. Dengan adanya sistem latihan gabungan yang adaptif dan berkelanjutan, Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang dapat memperkuat kemampuan kolaboratifnya, sekaligus meningkatkan efektivitas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Pulau Deli (Safi'i & Permana, 2021).

Pembentukan Sistem Komunikasi dan Koordinasi Berbasis Digital

Pembentukan sistem komunikasi dan koordinasi berbasis digital menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan komunikasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam kerjasama Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang. Dengan adanya sistem ini, pertukaran informasi dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dalam menghadapi situasi darurat maupun operasi rutin. Tujuan utama dari strategi ini adalah meminimalkan hambatan komunikasi antar satuan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi pertukaran data operasional maupun intelijen. Sasaran penerapan sistem ini adalah personel yang bertugas di Pulau Deli, khususnya mereka yang berada di garis depan pengamanan wilayah. Dengan komunikasi digital yang lebih cepat dan terstruktur, diharapkan koordinasi lintas satuan dapat berlangsung tanpa hambatan geografis, sehingga setiap ancaman dapat direspon secara cepat, tepat, dan terukur.

Untuk mewujudkan sistem komunikasi ini, beberapa langkah operasional perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, pembangunan infrastruktur komunikasi digital, termasuk pemasangan perangkat di pos-pos strategis di Pulau Deli serta integrasi dengan jaringan Kodim di daratan. Kedua, penyelenggaraan pelatihan intensif bagi personel agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, mengingat keberhasilan sistem digital bergantung pada keterampilan operator di lapangan. Ketiga, penerapan protokol koordinasi yang terstandarisasi agar alur komunikasi jelas, cepat, dan terhindar dari tumpang tindih informasi. Selain itu, uji coba sistem secara berkala juga sangat penting untuk memastikan kelancaran alur informasi, sekaligus melakukan perbaikan jika ditemukan kendala teknis. Dengan penerapan sistem komunikasi dan koordinasi berbasis digital ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang, sehingga pengamanan Pulau Deli dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan ancaman di era modern (Nugroho et al., 2024; Pratama et al., 2025; Uksan & Siahaan, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, strategi kerjasama antara Satgasmar Pasmar 1 dan Kodim 0601/Pandeglang dalam pengamanan Pulau Deli melibatkan sinergi pengamanan darat dan laut, dengan Satgasmar bertanggung jawab atas wilayah laut dan Kodim 0601 atas pengamanan teritorial darat. Meskipun strategi kerjasama ini terstruktur, terdapat hambatan seperti perbedaan pangkat, kesibukan Komandan Kodim, dan jarak geografis yang membatasi interaksi langsung. Untuk mengatasi hambatan ini, fasilitasi oleh Danlanal Banten dan penggunaan teknologi komunikasi seperti WhatsApp membantu menjaga komunikasi dan koordinasi operasional. Selain itu, kerjasama antara Koramil Malimping dan Satgasmar diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengamanan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernando, M. (2024). Pemberdayaan Satgas Marinir pengamanan pulau-pulau terluar guna meningkatkan pembinaan potensi maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. *Inovasi*, 11(1), 188–196. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p188-196.40343>
- Herdian, N., & Hermawan, H. B. (2024). Strategi kerjasama pentahelix penelitian dan pengembangan (Litbang) alutsista dalam pemenuhan kebutuhan pokok TNI (Studi kasus di PT. Pindad-Bandung). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 13(2), 214–226.
- Modeong, I., Kalalo, F. P., & Karisoh, F. J. M. M. (2020). Pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia berdasarkan hukum internasional dalam upaya keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, 8(3).
- Nugroho, S. S., Syahrier, F. A., Trisnawati, L., & Elvitaria, L. (2024). Implementasi pemerintahan digital pada sistem penilaian kinerja secara elektronik (E-Sikap) organisasi perangkat daerah. *SUMUR: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 12–20.
- Pamungkas, B. E., Subagyo, A., & Ginanjar, Y. (2024). Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Amerika (Studi kasus kerjasama program pendidikan militer TNI AD dengan US Army). *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1).
- Pratama, I. N., Hadi, A., Kusuma, L. S. T., Pratama, D. W., & Saputra, A. (2025). Penguatan peran pemuda melalui *digital economy for youth* berbasis pentahelix dalam kemajuan ekonomi daerah di Desa Gondang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 674–680.
- Safi'i, I., & Permana, M. F. S. (2021). Pengaruh penyiapan latihan pratugas Staf Operasi Mabes TNI dengan Staf Operasi Kormar terhadap efektivitas Satgasmar pulau terluar. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2), 147–154.
- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1).
- Susanto, M. A., Affriani, A. R., & Ramadhani, A. N. R. (2025). Penegasan dan penetapan batas desa indikatif studi kasus: Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Indonesian Journal of Geography Information Science*, 1(1).

- Sutanto, R. (2025). Strategi pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme guna mendukung penyelenggaraan OMSP dalam rangka memantapkan tugas pokok TNI. *Sparta Multidisciplinary Journal*, 1(1), 129–143.
- Uksan, A., & Siahaan, B. Y. (2024). Sinergitas aparat teritorial dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di era digital. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*.
- Varikta, S. (2020). Analisis kerja sama antara TNI AL dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dalam rangka mendukung kebijakan poros maritim dunia (Studi kasus implementasi program tol laut dengan menggunakan metode SWOT). *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(2).
- Yovinus. (2018). Model pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia dalam rangka menanggulangi ancaman keamanan dan pelanggaran hukum transnasional. *Jurnal Caraka Prabu*, 1(1), 79–98. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53>
- Yusnadi, D., Sumarno, A. P., & Apandi, M. A. (2025). Strategi kerjasama Zeni Nubika TNI AD dalam penyelenggaraan dekontaminasi dan evakuasi Nubika pada penanganan Covid-19 tahun 2020–2023. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 13(1).